

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM MENILAI  
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PADA BADAN  
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak)  
Program Studi Akuntansi*



Oleh

Nama : RINDANG ARUMDARI

NPM : 1505170642

Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA**

**MEDAN**

**2019**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2019, Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

Nama  
 NPM  
 Program Studi  
 Judul Skripsi

MEMUTUSKAN  
 RINDANG ARUMDARI  
 : 1505170640  
 : AKUNTANSI  
 ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM  
 MENGEVALUASI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PADA  
 BALAN PENGELUARAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
 KOTA MEDAN

Dinyatakan

(B) Lulus Pidisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

TIM PENGUJI  
 PENGUJI I PENGUJI II

(HENNY ZURIKA LUBIS, SE., M.Si)

(NURWANIL SE., M.Si)

Pembimbing  
  
 (ELIZAR SINAMBELA, SE., M.Si)

UMSU  
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

(ADE GUNAWAN, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

NAMA LENGKAP : RIINDANG ARUMDARI  
N.P.M : 1505170642  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM  
MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PADA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

ELIZAR SINAMBELA, SE., M.Si

Diketahui/Disetujui  
Oleh :

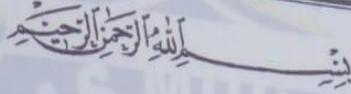
Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si

Dekan  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURL., SE., MM., M.Si



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

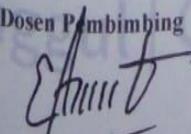
UNIVERSITAS : MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
 FAKULTAS : EKONOMI & BISNIS  
 PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
 JENJANG : STRATA SATU (S-1)  
 KETUA JURUSAN : FITRIANI SARAGIH, SE.,M.Si  
 DOSEN PEMBIMBING : ELIZAR SINAMBELA, SE.,M.Si

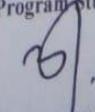
NAMA : RINDANG ARUMDARI  
 NPM : 1505170642  
 KONSENTRASI : KEUANGAN  
 TEMPAT RISET : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
	Bab IV: - Pastikan data sesuai dengan lap. yg ada - Analisis data menjelaskan makna data - Pembahasan menjawab Rumusan Masalah - Pastikan Rumusan Masalah terjawab		4/3-19
	Bab IV: - Perbaiki Pembahasan - Perjelas jawaban Rumusan Masalah		4/3-19
	Bab V: - Perbaiki kesimpulan - Perbaiki saran		4/3-19
	Buat Abstrak Kata Pengantar, Daftar Isi		
	Selesai bimbingan, Ace di uji pd Sidang Meja Hijau		4/3-19

Medan, Maret 2019  
 Diketahui / Disetujui  
 Ketua Jurusan / Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

  
 (ELIZAR SINAMBELA, SE., M.Si)

  
 (FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

NAMA : RINDANG ARUMDARI  
 NPM : 1505170642  
 PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
 KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN  
 JUDUL PROPOSAL : ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MEDAN

TGL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
	- Perjelas Masalah Penelitian - Perjelas Teori Pendukung - Buat Tabulasi Data	[Signature]	8/1-19
	Bab I - Masalah Penelitian diperjelas - Teori Pendukung Per Rasio - Benifan alasan penggunaan per rasio	[Signature]	17/1-19
	Bab II :- Uraian Teori ditambah Kutipannya bab III : Periksa kata / kalimat yang salah Lengkapi Daftar Pustaka	[Signature]	21/1-19
	Perbaiki kata / kalimat yg masih salah Acc, diseminarkan	[Signature]	4/2-19

Medan, Februari 2019  
 Diketahui / Disetujui  
 Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing  
 [Signature]  
 (ELIZAR SINAMBELA, SE., M.Si)

[Signature]  
 (FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

## SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RINDANG ARUMDARI  
NPM : 1505170642  
Fakultas : Ekonomi & Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Skripsi : **Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi dan data-data lainnya yang berkenaan dengan skripsi adalah benar saya peroleh dari **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan**. Apabila ternyata dikemudian hari data-data tersebut salah dan/atau merupakan hasil plagiat karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Medan, Maret 2019

METERAI TEMPEL  
E66CEADF038003407  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Hormat Saya  
  
Rindang Arumdari

## ABSTRAK

**Rindang Arumdari. 1505170642. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, 2019. Skripsi.**

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, dan rasio DSCR.

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Pemerintah Kota Medan berupa data-data jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah, realisasi pendapatan dan belanja daerah Kota Medan sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah kota medan, melalui analisis menggunakan rasio keuangan kemandirian, efektivitas, pertumbuhan, dan DSCR. Hasil penelitian menunjukkan Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Medan menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Rasio Efektivitas Pemerintah Kota Medan termasuk dalam kategori kurang efektif. Rasio Pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kota Medan dari tahun bernilai negatif karena cenderung mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima Pemerintah Kota Medan. Rasio DSCR Pemerintah Kota Medan sudah sangat baik, karena mampu melunasi pinjaman daerahnya.

**Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio DSCR.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq serta HidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan”**. sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Strata I (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Beriringan salam dihadiahkan kehadiran junjungan suri tauladan Nabi Besar Muhammad SAW.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan arahan serta dorongan dan nasihat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Yang teristimewa kedua orang tua penulis, Ayahanda alm Sojono dan Ibunda tercinta Rahmi Nuryanti serta Abangda Lanar Nurcholis Alfatan, dan Adinda Bunga Sakinah dan Gita Kana Ayomi yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M.Ap Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Januri, SE., M.Si. Selaku Dekan dan Dekan I, Bapak Ade Gunawan, SE., M.Si Selaku Wakil Dekan I, dan Bapak Dr. Harsudy Tanjung, SE., M.Si Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih, SE., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Zulia Hanum, SE., M.Si. Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Elizar Sinambela SE., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, arahan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas ilmu dan pembekalan yang diberikan kepada penulis selama melaksanakan studi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Teman – teman Stambuk 2015 khususnya kelas C-Akuntansi Siang, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan kalian semua.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan yang diberikan.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Medan, Maret 2019  
Penulis

**Rindang Arumdari**  
**1505170642**

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan dan Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>8</b>
A. Uraian Teori.....	8
B. Kerangka Berfikir .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	23
B. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	23
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	26
D. Jenis dan Sumber Data .....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data.....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
A. Hasil Penelitian .....	30
B. Pembahasan .....	44
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>46</b>
A. Kesimpulan .....	46
B. Saran .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

### LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
A. Tabel I.1 Pengukuran Keuangan Pemerintah Kota Medan .....	4
B. Tabel II.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah.....	14
C. Tabel II.2 Kriteria Pengukuran Efektivitas .....	16
D. Tabel II.3 PenelitianTerdahulu.....	18
E. Tabel III.2 Waktu Penelitian .....	23
F. Tabel IV.1 Rasio Kemandirian.....	33
G. Tabel IV.2 Pola Hubungan Kemandirian .....	33
H. Tabel IV.3 Rasio Efektifitas .....	36
I. Tabel IV.4 Kriteria Pengukuran Efektifitas .....	36
J. Tabel IV.5 Rasio Pertumbuhan .....	40
K. Tabel IV.6 Rasio DSCR .....	42

## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

A. Gambar II.1 Kerangka Berfikir .....	22
--	----

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Keuangan Daerah**

Faktor keuangan merupakan faktor yang penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan daerahlah yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Keuangan daerah dapat diartikan sebagai “Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku” (Mamesah,1995).

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pusdiklat Pengawasan BPKP, 2011).

Menurut UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penjelasan umum pasal 156 ayat (1) disebutkan, pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah pusat sesuai dengan urusan pemerintah pusat yang

diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

## **2. Laporan Keuangan Daerah**

Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah di capai. Menurut Mahmudi(2010) Secara garis besar tujuan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah adalah:

- 1) Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.
- 2) Untuk alat akuntabilitas publik.
- 3) Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah :

### **1) Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, aplikasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam

satu periode pelaporan. Dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan unsur yang dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan, yaitu semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak PEMDA, dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan dibagi menjadi 3 yaitu:
  - a) Pendapatan Asli Daerah
  - b) Dana Perimbangan
  - c) Lain-lain pendapatan yang sah
2. Belanja, yaitu semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemda. Belanja dibagi menjadi 3 jenis yaitu :
  - a) Belanja aparatur daerah
  - b) Belanja Pelayanan Publik
  - c) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
3. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemda terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan dikelompokkan menjadi:
  - a) Sumber penerimaan daerah, yaitu:

- (1) Sisa lebih anggaran penerimaan tahun lalu
  - (2) Penerimaan pinjaman dan obligasi
  - (3) Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan
  - (4) Transfer dari dana cadangan
- b) Sumber Pengeluaran daerah, yaitu:
- (1) Pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo
  - (2) Penyertaan modal
  - (3) Transfer ke dana cadangan
  - (4) Sisa lebih anggaran tahun sekarang

### **3. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

#### **a. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab akan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2008).

Menurut Wachid (2014: 2) “ Pengelolaan keuangan daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.”

Analisis Kinerja Keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan,

bagaimana mengevaluasi laporan keuangan dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang sering dianalisis untuk melihat kinerja keuangan pemerintah daerah adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Berdasarkan LRA tersebut pembaca dapat membuat analisis laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja dan analisis pembiayaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pendapatan dan analisis keserasian belanja.

#### **4. Rasio Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah perlu diperhatikan penggunaannya. Menurut Mahsun (2011:135) Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kiadah pengukurannya.

Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Halim 2008:4).

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki

suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Menurut Halim (2008:4) adapun pihak-pihak yang memiliki berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini yaitu: pihak DPRD, pihak eksekutif, pihak pemerintah pusat ataupun provinsi, serta masyarakat dan kreditor.

Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah : Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas , Rasio Pertumbuhan, dan Rasio DSCR.

#### **a. Rasio Kemandirian**

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman (Abdul Halim 2007:L-5). Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan Ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer (sumber data ekstern). Semakin tinggi

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan ) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

**Tabel II.1**  
**Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah**

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipasif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

*Sumber : Aulia Zhufinsa Nur Rahmatina, 2011*

- a). Pola Hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah. (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- b). Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.

- c). Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- d). Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

### **b. Rasio Efektivitas**

Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah dapat dikemukakan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel II.2**  
**Kriteria Pengukuran Efektivitas**

Kriteria Efektifitas	Persentase Efektifitas (0%)
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90% - 99%
Kurang Efektif	75% - 89%
Tidak Efektif	<75%

### c. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah. Rasio pertumbuhan berguna untuk melihat kemampuan atas pengelolaan dimasa yang lalu. Menurut Mahmudi (2010 hal.138) Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{PADt1 - PADt0}{PADt0} \times 100\%$$

Keterangan :

PADt1-PADt0 = Realisasi tahun ini dikurangi tahun sebelumnya.

PADt0 = Realisasi Penerimaan PAD tahun sebelumnya.

### d. DSCR (Debt Service Coverage Ratio)

Kemampuan daerah untuk mendapatkan pinjaman daerah jangka panjang menurut penjelasan pasal 54 huruf (b) UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah dapat diukur dengan cara menghitung *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*. Dalam PP No. 107 tahun 2000 disebutkan bahwa batasan DSCR adalah minimal 2,5 (dua setengah).

DSCR menunjukkan kemampuan Keuangan Daerah untuk membayar pokok pinjaman dan bunganya.

DSCR merupakan rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kembali pinjaman daerah. Rasio ini sangat diperlukan apabila pemerintah daerah berencana untuk mengadakan utang jangka panjang. Berdasarkan rasio ini, pemerintah daerah dinilai layak untuk melakukan pinjaman daerah apabila nilai DSCR-nya minimal sebesar 2,5

DSCR adalah perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta Dana Alokasi Umum setelah dikurangi Belanja Wajib (BW), dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. DSCR dapat dihitung dengan rumus (Halim, 2008 : 238).

$$\text{Rasio DSCR} = \frac{(\text{PAD} + \text{Dana Bagi Hasil} + \text{DAU}) - \text{Belanja Wajib}}{\text{Angsuran Pokok Pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}} \times 100\%$$

## **5 . Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Kota Medan pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan tempat dan waktu penelitian yang berbeda, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel II.3**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	Peneliti	Judul	Penelitian	Hasil Penelitian
1	Wakhyudi (2013)	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Rasio Keuangan Daerah	Penelitian ini menganalisis Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Rasio Keuangan Daerah	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Kemampuan pemerintah Kabupaten Bogor didalam mengelola keuangan daerahnya sendiri masih rendah. Selain itu, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dihadapkan pada beberapa hambatan yaitu: Penetapan Perda APBD dan Perda Perubahan APBD hingga Perda Laporan Realisasi APBD setiap tahunnya belum tepat waktu dan penganggarannya belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.
2	Heri Triyono (2013)	Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo APBD 2009-	Penelitian Menganalisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo APBD 2009-2011 yang diukur dengan menggunakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian rendah dengan tingkat ketergantungan dari pihak eksternal masih tinggi. Rasio efektivitas yang dicapai tinggi.

		2011	rasio keuangan daerah	Rasio efisiensi menunjukkan dalam memungut PAD sudah efisien. Rasio aktivitas pada belanja pembangunan masih rendah. Rasio pertumbuhan menunjukkan hasil yang positif. Rasio derajat desentralisasi rendah
3	Listiyani Natalia (2015)	Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah kabupaten sleman	Penelitian ini menganalisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan di Pemerintah Kabupaten Sleman baik, dalam merealisasikan belanja daerahnya sudah efisien karena tidak melebihi anggaran. Namun ketergantungan pemerintah daerah terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi
4	Anim Rahmayati (2016)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran	Penelitian ini menganalisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal. Walaupun dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sudah

		n 2011-2013		efektif dan efisien, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari besarnya bantuan dari pusat dan provinsi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, dalam penggunaan dananya masih belum berimbang karena sebagian besar dana digunakan untuk belanja operasi daripada belanja modal
5	Joko Pramono (2014)	Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)	Penelitian ini menganalisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta untuk tahun 2010 dan 2011 yang masih kurang atau perlu menjadi perhatian adalah pada aspek kemandirian dan aspek keserasian. Kemandirian Pemerintah Kota Surakarta dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan

				kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih sangat rendah, karena rasionya hanya sebesar 15,83 % (2010) dan 24,44% (2011).
--	--	--	--	--

## B. Kerangka Berfikir

Suatu organisasi sektor publik memerlukan adanya pengukuran kinerja untuk melihat serta menilai telah sejauh mana organisasi tersebut menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi swasta yang fokus operasionalnya hanya pada laba saja, tetapi organisasi sector publik lebih kepada meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Salah satu aspek dari Pemerintah Daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. (Nordiawan, dkk, 2007: 39)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrument kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sebagai instrumen kebijakan, APBD mendukung posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemda. APBD dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu

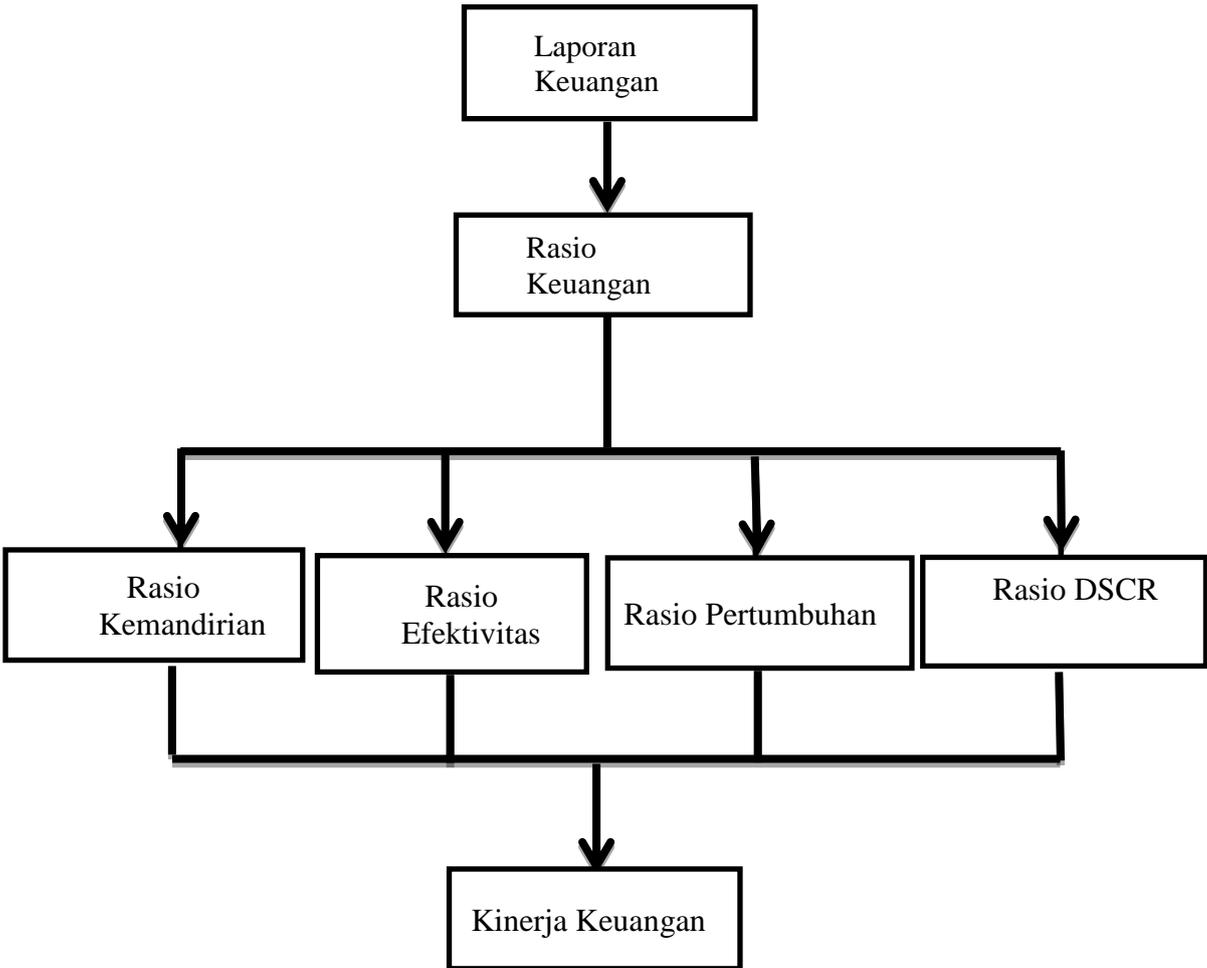
pengambilan keputusan dan pencapaian pembangunan, otoritas pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Penilaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sasaran yang diharapkan sebagai fungsi belanja, standar pelayanan diharapkan dan diperkirakan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan.

Salah satu cara untuk menganalisa kinerja pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap anggaran. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio diantaranya rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio pertumbuhan, dan rasio DSCR.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Addina Marizka (2010) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan dalam merealisasikan pendapatan pada tahun 2003-2007 dapat dikatakan efektif dan efisiensi, pertumbuhan pendapatan menunjukkan pertumbuhan positif.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti membuat kerangka berfikir sebagaimana di tunjukkan pada gambar II.1 sebagai berikut:



**Gambar II.1**  
**Kerangka Berfikir**

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Pemerintah Kota Tebing Tinggi berupa data-data jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah, realisasi pendapatan dan belanja daerah Kota Tebing Tinggi sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

Menurut Moh. Nazir (2009 hal. 54), Pendekatan deskriptif adalah metode dalam meneliti untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki.

### **B. Definisi Operasional Variabel**

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian ilmiah yang termuat dalam operasional variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang mencakup beberapa parameter berupa rasio, yaitu sebagai berikut :

#### **1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Adhiantoko (2013) menjelaskan bahwa: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas

dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian, kemampuan daerah dalam menjalankan, mengelola dan mengendalikan sumber daya daerahnya dengan baik dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Dimana kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan daerah yaitu:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer+Pinjaman}} \times 100\%$$

b. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

c. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode satu ke periode berikutnya, baik dilihat dari sumber pendapatan maupun pengeluaran.

Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{PADt1 - PADt0}{PADt0} \times 100\%$$

Keterangan :

$PADt1 - PADt0$  = Realisasi tahun ini dikurangi tahun sebelumnya.

$PADt0$  = Realisasi Penerimaan PAD tahun sebelumnya.

d. *DSCR (Debt Service Coverage Ratio)*

DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta Dana Alokasi Umum setelah dikurangi Belanja Wajib (BW), dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. DSCR dapat dihitung dengan rumus (Halim, 2008 : 238). Rasio DSCR dikatakan baik apabila rasio tercapai lebih dari 2,5 atau 250%.

$$\text{Rasio DSCR} = \frac{(PAD + \text{Dana Bagi Hasil} + DAU) - \text{Belanja Wajib}}{\text{Angsuran Pokok Pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}} \times 100$$

## C. Tempat dan Waktu Penelitian

### Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Medan di bagian akuntansi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jln. Kapten Maulana Lubis No. 02, Medan.

### Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan November 2018 sampai bulan Maret 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel III.4 sebagai berikut :

**Tabel III – II  
Waktu Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2018				Tahun 2019											
		N				Des			Jan			Feb			Mar		
1	Pengajuan Judul																
2	Penulisan Proposal																
3	Seminar Proposal																
4	Penulisan Skripsi																
5	Sidang Meja Hijau																

Sumber Data : (Diolah Penulis)

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### 1. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa laporan realisasi anggaran yaitu berupa dengan mempelajari, mengamati, dan menganalisa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. Cara pengumpulan data ini diperoleh dari wawancara langsung di tempat penelitian.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa data dokumentasi yaitu laporan anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Medan 2013-2017

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan data-data yang ada. Dalam dokumentasi yaitu kantor Pemerintahan Kota Medan tepatnya di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang di peroleh penelitian secara langsung.

## **F. Teknik Analisa Data**

Metode teknik analisis data menggunakan metode deskriptif pendekatan kuantitatif yang merupakan metode yang digunakan untuk merumuskan perhatian terhadap masalah yang dihadapi, dimana data yang dikumpulkan, disusun dan dianalisis sehingga dapat memberikan informasi masalah yang ada. Adapun teknik analisa data dapat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

1. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, objek penelitian yaitu pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
2. Menghitung data dengan menggunakan rasio Kemandirian, rasio Efektifitas, rasio Pertumbuhan, dan rasio DSCR.
3. Menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil perhitungan untuk memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan.
4. Menganalisis dan membahas kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dengan indikator yang sesuai dengan teori.
5. Menyimpulkan permasalahan yang terjadi pada perhitungan yang menggunakan rasio kemandirian, efektivitas, pertumbuhan, dan DSCR.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Data**

Pemerintah Kota Medan yang merupakan salah satu bagian dari Provinsi Sumatera Utara yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Untuk kelangsungan dan kemajuan dari Kota Medan maka diharapkan Kota Medan mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kota Medan. Dengan terus menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kota Medan, maka nantinya akan mampu meningkatkan pajak daerah, sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi, dengan analisis rasio keuangan pemerintah daerah dapat menilai kemandirian keuangan daerah, mengukur efektivitas keuangan daerah, menilai pertumbuhan keuangan daerah, dan mengukur pinjaman daerah daerah, dalam merealisasikan pendapatan asli daerah, dan mengukur masing-masing sumber pendapatan dalam membentuk pendapatan daerah.

## 2. Analisis Data

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Medan dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan untuk kurun waktu 2013-2017. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Medan pada penelitian ini adalah: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah, dan Rasio DSCR.

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan yang didapat dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Medan. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan. Adapun hasil dari Analisis Rasio tersebut adalah:

### a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dengan pendapatan transfer dari pemerintahan pusat dan provinsi serta pinjaman daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

$$= \frac{Rp\ 1.206.169.709.147}{Rp\ 2.073.546.898.858} \times 100\%$$

$$= 58,17\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{Rp\ 1.384.246.114.729}{Rp\ 2.657.869.713.502 + Rp\ 20.784.820.138} \times 100\%$$

$$= \frac{Rp\ 1.384.246.114.729}{Rp\ 2.678.654.533.640} \times 100\%$$

$$= 51,68\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{Rp\ 1.489.723.189.088}{Rp\ 2.769.321.301.626 + Rp\ 2.221.380.000} \times 100\%$$

$$= \frac{Rp\ 1.489.723.189.088}{Rp\ 2.771.542.681.626} \times 100\%$$

$$= 53,75\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{Rp\ 1.535.259.539.056}{Rp\ 2.772.807.342.010} \times 100\%$$

$$= 55,37\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{Rp\ 1.739.756.922.633}{Rp\ 2.669.308.559.567} \times 100\%$$

$$= 65,18\%$$

Besarnya rasio kemandirian keuangan daerah pada Kota Medan tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.1**  
**Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Medan**  
**Tahun Anggaran 2013-2017**

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Pinjaman (Rp)	Rasio Kemandirian (%)
2013	1.206.169.709.147	2.206.845.776.012	12.701.122.846	58,17%
2014	1.384.246.114. 729	2.657.869.713.502	20.784.820.138	51,68%

2015	1.489.723.189.088	2.769.321.301.626	2.221.380.000	53,75%
2016	1.535.259.539.056	2.772.807.342.010	-	55,37%
2017	1.739.756.922.633	2.669.308.559.567	-	65,18%
Rata-rata				56,83%

*Sumber : Data diolah (2019)*

Kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan seperti tabel berikut :

**Tabel IV.2**  
**Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah**

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

*Sumber : Aulia Zhufinsa Nur Rahmatina, 2011*

- a). Pola Hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah. (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- b). Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.
- c). Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah bersangkutan tingkat

kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.

- d). Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Dilihat dari hasil perhitungan diatas, maka untuk Rasio Kemandirian Kota Medan yang diukur dalam 5 tahun, dimana tahun 2013 rasio kemandirian sebesar 58,17%, yang termasuk dalam kategori sedang dan termasuk dalam pola hubungan partisipatif karena berada diantara 50%-75%, untuk tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 51,68% juga termasuk dalam kategori sedang dan termasuk pola hubungan partisipatif karena berada diantara 50%-75%, pada tahun 2015, 2016 dan 2017 Rasio Kemandirian mengalami peningkatan menjadi 53,75%, 55,37% dan 65,18% yang juga termasuk dalam kategori sedang dan termasuk dalam pola hubungan partisipatif karena berada diantara 50%-75%.

Dimana maksud dari pola hubungan partisipatif adalah pola hubungan dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah bersangkutan tingkat Kemandirian Pemerintah Kota Medan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerahnya.

Kemampuan keuangan pemerintah kota medan dilihat dari rasio kemandirian diatas menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.

b. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013} &= \frac{\text{Rp } 3.276.344.285.159}{\text{Rp } 4.106.900.462.377} \times 100\% \\ &= 79,78\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{\text{Rp } 4.042.115.828.231}{\text{Rp } 4.560.412.529.543} \times 100\% \\ &= 88,63\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{\text{Rp } 4.259.044.490.715}{\text{Rp } 5.046.111.839.162} \times 100\% \\ &= 84,40\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{\text{Rp } 4.308.066.881.066}{\text{Rp } 5.490.162.683.367} \times 100\% \\ &= 78,47\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{\text{Rp } 4.409.065.482.200}{\text{Rp } 5.523.623.117.419} \times 100\% \\ &= 79,82\% \end{aligned}$$

Besarnya rasio efektivitas keuangan daerah pemerintah Kota Medan pada tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.3**  
**Rasio Efektivitas Pendapatan Pemerintah Kota Medan**  
**Tahun Anggaran 2013-2017**

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)
2013	4.106.900.462.377	3.276.344.285.159	79,78%
2014	4.560.412.529.543	4.042.115.828.231	88,63%
2015	5.046.111.839.162	4.259.044.490.715	84,40%
2016	5.490.162.683.367	4.308.066.881.066	78,47%
2017	5.523.623.117.419	4.409.065.482.200	79,82%
Rata-rata			82,22%

*Sumber : Data diolah (2019).*

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio efektivitas yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin efektif.

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah dapat dikemukakan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel IV.4**  
**Kriteria Pengukuran Efektivitas**

Kriteria Efektifitas	Persentase Efektifitas (0%)
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90% - 99%
Kurang Efektif	75% - 89%
Tidak Efektif	<75%

*Sumber : Kepmendagri No. 690.900-327, 1996.*

Dilihat dari hasil perhitungan pada rasio efektivitas diatas pendapatan daerah pemerintah Kota Medan yang diukur dalam 5 tahun, dimana tahun 2013 dan 2014 mengalami peningkatan , tetapi untuk tahun 2015, 2016,

dan 2017 rasio efektivitas mengalami penurunan. Untuk tahun 2013 rasio efektivitas sebesar 79,78%, tahun 2014 sebesar 88,63% yang termasuk dalam kategori kurang efektif karena masih di bawah 100% yaitu diantara 75%-89%. Sedangkan untuk tahun 2015, 2016 dan 2017 mengalami penurunan menjadi 84,40%, 78,47%, dan 79,82% juga masih termasuk dalam kategori kurang efektif karena masih berada dibawah 100% yaitu diantara 75%-89%.

Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi pendapatan daerah terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya target realisasi pendapatan daerah dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi. Untuk target pendapatan daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan untuk tingkat realisasi atas pendapatan daerah cenderung mengalami penurunan, hal ini dibuktikan dengan tingkat rasio efektivitas atas pendapatan daerah yang mengalami penurunan. Dengan menurunnya rasio efektivitas atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja dari pendapatan daerah mengalami penurunan pada Pemerintah Kota Medan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah daerah Kota Medan kurang efektif dalam mengelola pendapatan asli daerahnya karena nilai rasio efektivitas menunjukkan angka 75%-89% yang termasuk kriteria kurang efektif. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin efektif.

Adapun faktor yang menyebabkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan tidak Efektif dilihat dari rasio Efektivitas keuangan daerah disebabkan karena pendapatan daerah masih dibawah dari yang dianggarkan sebelumnya. Dengan menurunnya rasio ini juga menunjukkan Pemerintah Kota Medan dapat dikatakan memiliki kinerja keuangan yang kurang efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dari data yang dimiliki ternyata upaya untuk menghasilkan pendapatan tidak sesuai target. Hal ini disebabkan rendahnya penerimaan yang dihasilkan dari pendapatan dan belanja tidak maksimal.

c. Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, kinerja keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah.

Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{PADt1 - PADt0}{PADt0}$$

Keterangan :

$PADt1 - PADt0$  = Realisasi tahun ini dikurangi tahun sebelumnya.

$PADt0$  = Realisasi Penerimaan PAD tahun sebelumnya.

$$\text{Tahun 2013} = \frac{\text{Rp } 3.276.344.285.159 - 0}{0} \times 100\%$$

$$= 0$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{\text{Rp } 4.042.115.828.231 - 3.276.344.285.159}{\text{Rp } 3.276.344.285.159} \times 100\%$$

$$= 23,37\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{Rp } 4.259.044.490.715 - \text{Rp } 4.042.115.828.231}{\text{Rp } 4.042.115.828.231} \times 100\%$$

$$= 5,37\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp } 4.308.066.881.066 - \text{Rp } 4.259.044.490.715}{\text{Rp } 4.259.044.490.715} \times 100\%$$

$$= 1,15\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Rp } 4.409.065.482.200 - \text{Rp } 4.308.066.881.066}{\text{Rp } 4.308.066.881.066} \times 100\%$$

$$= 2,34\%$$

**Tabel IV.5**  
**Rasio Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Kota Medan**  
**Tahun Anggaran 2013-2017**

Tahun	Pendapatan Awal (Rp)	Pendapatan Akhir (Rp)	Rasio Pertumbuhan Pendapatan (%)
2013	0	3.276.344.285.159	0%
2014	3.276.344.285.159	4.042.115.828.231	23,37%
2015	4.042.115.828.231	4.259.044.490.715	5,37%
2016	4.259.044.490.715	4.308.066.881.066	1,15%
2017	4.308.066.881.066	4.409.065.482.200	2,34%
Rata-rata			8,06%

*Sumber: Data diolah (2019)*

Dilihat dari hasil perhitungan pada rasio pertumbuhan di atas pendapatan daerah pemerintah Kota Medan yang diukur dalam 5 tahun, dimana pada tahun 2014-2016 mengalami penurunan dan pada tahun 2017 rasio pertumbuhan mengalami peningkatan. Untuk tahun 2014 rasio pertumbuhan pendapatan sebesar 23,37%, tahun 2015 sebesar 5,37%, dan tahun 2016 sebesar 1,15%. Dan untuk tahun 2017 rasio pertumbuhan pendapatan mengalami peningkatan menjadi 2,34%.

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah yang terjadi pada pemerintah Kota Medan untuk tahun 2014-2017 merupakan pertumbuhan negatif karena cenderung mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima Pemerintah Kota Medan.

d. Rasio Pinjaman Daerah (DSCR)

Rasio DSCR merupakan perbandingan antara pendapatan asli daerah, bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. Ukuran minimal DSCR adalah 2,5.

Rumus untuk menghitung Rasio DSCR adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio DSCR} = \frac{(\text{PAD} + \text{Dana Bagi Hasil} + \text{DAU}) - \text{Belanja Wajib}}{\text{Angsuran Pokok Pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013} &= \frac{(\text{Rp } 3.276.344.285.159 + 174.054.637.589 + 1.270.244.794.000) - 2.593.084.833.763}{\text{Rp } 12.701.122.846 + 4.993.144.103} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 2.127.558.882.982}{\text{Rp } 17.694.266.949} \times 100\% \\ &= 12,02\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{(\text{Rp } 4.042.115.828.231 + 149.026.739.931 + 1.393.504.580.000) - 2.939.241.615.113}{\text{Rp } 20.784.820.138 + 1.424.780.450} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 2.645.405.533.049}{\text{Rp } 22.209.600.588} \times 100\% \\ &= 11,91\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{(\text{Rp } 4.259.044.490.715 + 123.573.101.363 + 1.232.071.365.000) - 3.457.801.274.812}{\text{Rp } 2.221.380.000 + 102.194.330} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 2.156.887.682.266}{\text{Rp } 2.323.574.330} \times 100\% \\ &= 92,83\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{(\text{Rp } 4.308.066.881.364 + 224.272.293.448 + 1.611.940.995.000) - 3.585.760.813.580}{\text{Rp } 0 + 0} \times 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{(\text{Rp } 4.409.065.482.200 + 199.321.136.670 + 1.583.624.355.000) - 3.398.349.177.322}{\text{Rp } 0 + 0} \times 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

**Tabel IV.6**  
**Rasio Pinjaman Daerah (DSCR) Pemerintah Kota Medan**  
**Tahun Anggaran 2013-2017**

Keterangan	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
PAD	3.276.344.285. 159	4.042.115.828. 231	4.259.044.490. 715
Dana Bagi Hasil Pajak	172.440.05 3.470	146.798.093.69 3	121.401.841.15 0
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	1.614.584.1 16	2.228.646.238	2.171.260.213
DAU	1.270.244.794. 000	1.393.504.580. 000	1.232.071.365. 000
<b>Jumlah</b>	<b>4.720.643.716. 745</b>	<b>5.584.647.148. 162</b>	<b>5.614.688.957. 078</b>
<b>Belanja wajib</b>	<b>2.593.084.833. 763</b>	<b>2.939.241.615. 113</b>	<b>3.457.801.274. 812</b>
Angsuran Pokok Hutang	12.701.122. 846	20.784.820.138	2.221.380.000
Belanja Bunga	4.993.144.1 03	1.424.780.450	102.194.330
<b>Jumlah</b>	<b>17.694.266. 949</b>	<b>22.209.600.588</b>	<b>2.323.574.330</b>
Rasio DSCR	<b>12,02%</b>	<b>11,91%</b>	<b>92,83%</b>

Keterangan	2016 (Rp)	2017 (Rp)
PAD	4.308.066.881.36 4	4.409.065.482. 200
Dana Bagi Hasil Pajak	222.056.416.659	198.592.781.67 5
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	2.215.876.789	728.354.995
DAU	1.611.940.995.00 0	1.583.624.355. 000
<b>Jumlah</b>	<b>6.144.280.169.81 2</b>	<b>6.192.010.973. 870</b>
<b>Belanja wajib</b>	<b>3.585.760.813.58 0</b>	<b>3.398.349.177. 322</b>

Angsuran Pokok Hutang	-	-
Belanja Bunga	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-
Rasio DSCR	-	-
<b>Rata-rata</b>		<b>23,35%</b>

*Sumber : Data diolah (2019)*

Keterangan: tanda (-) berarti daerah tidak mempunyai Pinjaman, Bunga dan Biaya lain yang jatuh tempo sehingga tidak memiliki *DSCR*.

Berdasarkan hasil perhitungan pada rasio *DSCR* diatas dapat diketahui bahwa kemampuan membayar kembali pinjaman dari pemerintah daerah Kota Medan pada tahun 2013-2015 sangat baik karena rasio *DSCR* diatas 2,5 dan pada tahun 2016-2017 daerah pemerintah Kota Medan tidak mempunyai pinjaman, bunga dan biaya lain yang jatuh tempo sehingga tidak memiliki *DSCR*.

Ketentuan yang menyangkut persyaratan suatu daerah dapat melakukan pinjaman yaitu memiliki rasio *DSCR* minimal 2,5. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan dilihat dari rasio *DSCR* tahun 2013-2015 sudah sangat baik, dikarenakan rasio *DSCR* diatas 2,5 dan di tahun 2016-2017 pemerintah daerah kota medan tidak mempunyai Pinjaman, Bunga dan Biaya lain yang jatuh tempo sehingga tidak memiliki *DSCR*, berarti Pemerintah Kota Medan tidak memiliki pinjaman daerah kembali pada tahun tersebut.

## **B. Pembahasan**

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan yang diukur dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada tahun 2013-2017.

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan jika dilihat dari rasio kemandirian di tahun 2013-2017 rata-rata 56,83% yang termasuk kedalam kategori sedang pola hubungan partisipatif, dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat tingkat Kemandirian Pemerintah Kota Medan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerahnya.

Rasio Kemandirian yang sedang menggambarkan kemampuan keuangan pemerintah daerah kota medan dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah hampir tidak tergantung pada bantuan pemerintah pusat. Jadi kemandirian pemerintah kota medan secara keseluruhan dapat dikatakan sedang, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan pemerintah kota medan sudah cukup mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya.

Rasio kemandirian pemerintah daerah kota medan di katakan sedang karena, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, begitu juga dengan tingkat ketergantungan pemerintah daerah kota medan terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah.

2. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan yang diukur dengan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah pada tahun 2013-2017.

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan jika dilihat dari rasio efektivitas ditahun 2013-2017 rata-rata 82,22% yang termasuk kedalam kategori kurang efektif karena masih berada dibawah 100% yaitu diantara 75-89% yang menggambarkan pemda kurang efektif dalam mengoptimalkan pencapaian target-targetnya dengan potensi riil yang sudah ditetapkan.

Rasio Efektivitas yang kurang efektif menggambarkan kemampuan keuangan pemerintah daerah kota medan. Berbagai kemungkinan kurang efektifnya pemda Kota Medan dalam merealisasikan target pendapatan daerah salah satunya tingginya beban atau biaya dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah dan sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Pemerintah daerah kota medan dikatakan kurang efektif dikarenakan kurangnya ketelitian dalam mentukan atau menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah secara riil sesuai dengan aturan yang berlaku dan kedisiplinan aparatur daerah juga sangat dibutuhkan dalam merealisasi target pendapatan asli daerah yang ditetapkan setiap tahunnya.

3. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan yang diukur dengan Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah pada tahun 2013-2017.

Pertumbuhan pendapatan daerah dari tahun 2014-2017 merupakan pertumbuhan negatif karena cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata 8,06%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kota medan tidak mampu dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang

telah dicapai dari periode ke periode di karenakan kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima Pemerintah Kota Medan.

Pemerintah daerah kota medan dikatakan pertumbuhan negatif karena dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah di capai selama beberapa periode pemerintah daerah kota medan belum mampu mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu diperhatikan.

#### 4. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan yang diukur dengan Rasio Pinjaman Daerah (DSCR) pada tahun 2013-2017.

Berdasarkan hasil perhitungan pada rasio DSCR dapat diketahui bahwa kemampuan membayar kembali pinjaman dari pemerintah daerah Kota Medan pada tahun 2013-2015 sangat baik karena rasio DSCR diatas 2,5 dan pada tahun 2016-2017 pemerintah daerah kota medan tidak mempunyai Pinjaman, Bunga dan Biaya lain yang jatuh tempo sehingga tidak memiliki *DSCR*, berarti Pemerintah Kota Medan tidak melakukan pinjaman daerah kembali pada tahun tersebut.

Pemerintah daerah kota medan dikatakan baik karena DSCR Kota medan mencapai diatas 2,5 dan mengalami peningkatan disebabkan ada pengaruh meningkatnya dana alokasi umum sebagai dana perimbangan yang menjadi hak daerah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari analisis kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan berdasarkan penelitian yang diukur melalui rasio keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Kemandirian Pemerintah Kota Medan tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
2. Efektivitas pendapatan Pemerintah Kota Medan tahun 2013-2017 termasuk dalam kategori kurang efektif karena masih dibawah 100%.
3. Pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kota Medan dari tahun 2015-2016 bernilai negatif karena cenderung mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima Pemerintah Kota Medan.
4. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Medan dilihat dari rasio DSCR tahun 2013-2015 sudah sangat baik, karena diatas 2,5 dan di tahun 2016 dan 2017 tidak memiliki pinjaman daerah lagi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah Kota Medan lebih mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada maupun yang belum diolah agar dapat meningkatkan PAD sehingga ketergantungan terhadap sumber dana ekstern dapat diminimalisir.
2. Sebaiknya Pemerintah Kota Medan lebih proporsional di dalam mengalokasikan belanjanya dengan mengurangi belanja operasional dan meningkatkan belanja modal.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan melakukan penambahan waktu dalam penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anim Rahmayati (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013*. Jurnal EKA CIDA Vol. 1 No. 1 Maret 2016.
- Arja Sadjiarto.(2000). *Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan*. Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 2, No. 2, Nopember 2000: 138 – 150.
- Fitri Umi Hanik.(2014). *Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang)*. JABPI ISSN Vol. 22, No 2, Juli 2014.
- Joko Pramono.(2014). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta*. Among Makarti, Vol.7 No.13, Juli 2014.
- Heri Triyono.(2013).*Analisis Rasio untuk mengukur kinerja keuangan daerah kabupaten sukoharjo*.
- Kasmir.(2008). *Analisis Laporan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Listiyani Natalia. (2015). *Analisis laporan keuangan dalam mengukur kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten sleman*.
- Mahmudi.(2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. PT. Erlangga: Jakarta.
- Mohamad Mahsun.(2011). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPF: Yogyakarta.
- Paramitha Sandy Mokodompit, *et al.*(2014). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu*.Jurnal EMBA 1521 Vol.2 No.2 Juni 2014, Hal. 1521-1527.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2015*: Jakarta.
- Puput Risky Pramita.(2015). *Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013*. Skripsi . Fakultas Ekonomi Yogyakarta.
- Putri Kemala Dewi Lubis dan Nurlia Hafni.( 2017 ). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011–2013*. KITABAH: Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2017.

Sawir. Agnes.(2005). *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sudirman Pauwah, *et al.*( 2014). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemda Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara*. Jurnal EMBA 1 Vol.2 No.3 September 2014, Hal. 001-012.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)*: Jakarta.

Wakhyudi.(2013). *Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Rasio Keuangan Daerah*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan. Vol. 1 No. 2, 2013.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rindang Arumdari  
NPM : 1505170642  
TTL : Medan, 14 Februari 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Jl. Rotan 3 No 3 P.Simalingkar  
No. Hp/WA : 0857 6101 5125  
Email : [arumdari14@gmail.com](mailto:arumdari14@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

- 2003-2009 : SD Negeri 068007 Medan
- 2009-2012 : MTS Amal Shaleh Medan
- 2012-2015 : SMA Negeri 17 Medan
- 2015-sekarang : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)  
Fakultas Ekonomi & Bisnis, Jurusan Akuntansi

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya,atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Medan, Maret 2019

Hormat Saya

Rindang Arumdari